



Judul	: Catatan akhir tahun komisi VI terkait perdagangan: negara tak boleh netral saat pasar global makin timpang
Tanggal	: Selasa, 06 Januari 2026
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 3

Catatan Akhir Tahun Komisi VI Terkait Perdagangan

Negara Tak Boleh Netral Saat Pasar Global Makin Timpang

Di tengah ekonomi global yang semakin terfragmentasi, perdagangan internasional tidak lagi bisa dipahami sebagai aktivitas netral antara penjual dan pembeli lintas negara. Perdagangan kini menjadi arena persaingan kekuatan modal, teknologi, dan kepentingan geopolitik.

"PERDAGANGAN adalah wajah kehadiran negara di pasar. Jika negara bersikap netral, maka pasar akan dikusasi oleh mereka yang paling kuat modal dan teknologinya, bukan oleh pelaku usaha nasional," tegas Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, di Jakarta Senin (5/1/2026).

Pernyataan ini, lanjut Darmadi, penting untuk membaca kinerja Kementerian Perdagangan sepanjang tahun berjalan bukan hanya dari sisi realisasi program, tetapi dari arah kebijakan dan keberpihakan jangka panjangnya.

"Pandangan bahwa perdagangan bebas otomatis menciptakan kesejahteraan telah lama dikritik para ekonomi dunia. Paul Krugman melalui New Trade Theory menegaskan bahwa perdagangan justru cenderung menciptakan konsentrasi pasar akibat skala ekonomi dan dominasi korporasi besar," katanya.

Dalam praktik global, lanjut

Darmadi, pasar bebas selalu melahirkan pemenuhan dan yang tersingkir. Tanpa kebijakan negara yang sadar dan aktif, pelaku usaha kecil hampir pasti kalah.

Kondisi ini sangat relevan bagi Indonesia. Data menunjukkan bahwa impor barang konsumsi Indonesia masih berada di kisaran USD 20-25 miliar per tahun, dengan porsi signifikan berasal dari produk bernilai tambah rendah yang sesungguhnya bisa diproduksi di dalam negeri. Pada saat yang sama, nilai transaksi e-commerce lintas negara tumbuh dua digit setiap tahun, memperbesar tekanan terhadap produk lokal.

"Kalau kita membuka pasar selebar-lebarnya tanpa instrumen pengaman yang kuat, UMKM kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri," ujar Darmadi.

Sepanjang tahun berjalan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melakukan



Darmadi Durianto

pengendalian impor, pengawasan barang beredar, misi dagang ke pasar non-tradisional, serta promosi ekspor. Langkah-langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara.

Namun, tegas Darmadi, secara struktural, kebijakan tersebut masih menyisakan persoalan mendasar. Pertama, pengamanan pasar domestik, terutama di sektor perdagangan digital, masih lemah. Produk impor murah masuk melalui platform digital dengan pengawasan standar mutu asal barang, dan kewajiban perpajakan yang belum optimal. Akibatnya, terjadi kompetisi yang tidak seimbang antara produk lokal dan produk impor.

Kedua, struktur ekspor nasional masih didominasi komoditas mentah dan setengah jadi. Lebih dari 60% ekspor Indonesia masih berbasis sumber daya alam, membuat kinerja ekspor sangat rentan terhadap fluktuasi harga global.

Ketiga, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih rendah, berada di kisaran 15-16%, jauh tertinggal dibanding negara ASEAN lain seperti Thailand dan Vietnam. Ini menunjukkan bahwa promosi ekspor UMKM belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan industri dan pembiayaan.

"Kita rajin bicara ekspor, tapi lupa bahwa tanpa industrialisasi, ekspor hanya memperpanjang ketergantungan," kata Darmadi.

"Kita tidak anti perdagangan bebas. Tapi perdagangan harus tunduk pada kepentingan nasional, bukan sebaliknya," tambah Darmadi.

Darmadi juga menyebut tiga tantangan utama yang perlu segera dibenahi. Pertama, lemahnya integrasi kebijakan perdagangan dan industri. Impor masih sering tidak selaras dengan peta jalan industrialisasi nasional.

Kedua, ketimpangan posisi tawar UMKM. UMKM diminta

bersaing di pasar terbuka, tetapi tanpa perlindungan memadai dari praktik predatory pricing dan dominasi platform besar. Ketiga, fragmentasi tata kelola lintas kementerian dan lembaga, yang membuat kebijakan perdagangan kehilangan daya dorong struktural.

"Kalau perdagangan, industri, koperasi, dan investasi terus berjalan sendiri-sendiri, kita akan mengulang masalah yang sama setiap tahun," ujar Darmadi.

Memasuki tahun berikutnya, Darmadi menyarankan, kebijakan perdagangan nasional perlu diarahkan ulang secara lebih tegas. Pertama, menjadikan perdagangan sebagai instrumen industrialisasi dan hilirisasi, bukan sekadar peningkatan volume transaksi.

Kedua, memperkuat tata kelola perdagangan digital, termasuk pengaturan algoritma, harga, dan perdagangan lintas batas.

Ketiga, afirmasi nyata bagi UMKM dan koperasi, agar kontribusinya terhadap ekspor dapat meningkat secara signifikan.

Keempat, penguatan koordinasi lintas kementerian, agar perdagangan menjadi bagian dari desain besar transformasi ekonomi nasional. ■ **TIF**